

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN DI DAERAH TERTINGGAL MELALUI PENGEMBANGAN TANAMAN SAGU

Nurul Husna

Program Vokasi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian,  
Institut Pertanian Bogor  
Email: [nurulhusnah15@gmail.com](mailto:nurulhusnah15@gmail.com)

## Abstrak

Lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan dicetuskannya program pembangunan pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan latar belakang dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian ini merupakan kementerian yang melaksanakan fungsi untuk memperkuat dan membersayakan desa agar mampu berpemerintah secara mandiri (*self growing community*) dan melakukan tata kelola desa (*village governance*) di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui pengembangan tanaman sagu. Artikel ini menggunakan metode studi literatur dari berbagai sumber kepustakaan. Studi ini menghasilkan bahwa tahap implementasi program, pemberdayaan masyarakat berbasis keterpaduan dan otonomi daerah mengandung beberapa kendala: (1) keberagaman persepsi atau pemahaman mengenai kewenangan daerah dan pusat; (2) kompleksitas persoalan otonomi dan keterpaduan berakibat pada beratnya beban yang disandang lembaga pemerintah seperti kecamatan; (3) kurang responsifnya pemerintah kabupaten akan kebutuhan masyarakat baik ketidaksesuaian dengan kebutuhan maupun lambatnya perangkat peraturan yang diberikan. Melalui tanaman sagu harapannya masyarakat dapat membangun desanya masing-masing.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan masyarakat; program terpadu; otonomi daerah; daerah tertinggal.

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau (BPS 2015). Pulau-pulau tersebut tidak semuanya mendapatkan akses yang mudah untuk

dijangkau. Keterbatasan antara jarak dengan pusat kota menjadi beberapa permasalahan cukup serius yang dihadapi pulau-pulau tersebut. Masalah seperti listrik, pangan, dan fasilitas penunjang tidak tersedia bagi masyarakat setempat, padahal jika ditinjau lebih lanjut ada pulau-pulau yang sebenarnya dapat dijangkau tetapi tidak mendapatkan fasilitas yang memadai sehingga sulit untuk mengaksesnya.

Bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan antara Indonesia dengan negara lain dan jarak untuk menjangkau kota yang ada di Indonesia lebih jauh dibandingkan jarak kota yang ada di negara lain, masyarakat lebih memilih kota yang jaraknya lebih dekat. Hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di daerah pinggiran atau daerah tertinggal. Jika ditinjau lebih jauh, dari segi potensi sumber daya alam, daerah pinggiran atau tertinggal tidak kalah dengan dengan yang ada di kota, bahkan melebihi potensi sumber daya alam yang ada di pusat kota.

Daerah tertinggal ialah daerah yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dan berpenduduk relatif tertringgal. Penyebabnya dapat berupa letak geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana, rawan konflik, dan bencana serta karena kebijakan pembangunan. Daerah tertinggal umumnya memiliki kondisi geografis yang relatif sukit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, pegunungan/perbukitan, kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terpencil atau faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik, transportasi maupun media komunikasi. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumber daya alam, daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya meruakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebih (Djoefrie et al. 2013).

Kawasan sagu banyak terdapat di daerah tertinggal atau di daerah pinggiran yang berbatasan dengan negara lain. Kawasan sagu merupakan daerah yang relatif

kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain, kesejahteraan masyarakatnya memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. Perlu percepatan pembangunan di daerah tersebut yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, aksesibilitas, dan infrastruktur masih tertinggal dibanding daerah lainnya.

Potensi sumber daya alam tanaman lokal yang dimiliki Indonesia yaitu sagu. Sagu banyak tumbuh pada daerah yang jarang disentuh oleh manusia. Lingkungan tumbuh yang jauh dari pusat kota menyebabkan sagu dapat tumbuh subur tanpa adanya gangguan dari luar. Akan tetapi fungsi alih lahan sudah semakin tinggi dan daerah yang dijadikan untuk mengembangkan wilayah yaitu kawasan sagu. Menurut Djoefrie (2014) dari luasan sagu yang ada di Papua dan Papua Barat sebanyak 5,2 juta ha, dari luasan tersebut sebanyak 2 juta ha sudah keluar izin untuk alih fungsi lahan. Apabila hal tersebut dibiarkan dan terus ditingkatkan untuk alih fungsi lahan maka keanekaragaman sagu yang unggul sudah diakui oleh negara lain dan dipatenkan akan hilang. Dengan adanya kegiatan tersebut banyak kerugian yang didapatkan Indonesia, sedangkan potensi sagu untuk dijadikan sumber pangan, pemanis, dan bioenergi sangat besar.

Sagu dapat dijadikan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia yang cukup besar. Kepadatan penduduk yang ada di Indonesia menyebabkan kebutuhan pangan terhadap konsumsi karbohidrat meningkat. Proyeksi BPS (2013) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 255 juta jiwa dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Konsumsi karbohidrat Indonesia masih terpusat oleh beras sehingga kekurangan kebutuhan beras Indonesia diatasi oleh adanya impor beras dari negara lain. Jika dikaji lebih dalam terkait sumber karbohidrat, Indonesia tidak akan kekurangan karbohidrat bahkan surplus karbohidrat. Sumber-sumber karbohidrat selain beras dapat dihasilkan dari sagu, jagung, sorgum, ubi kayu, garut, ganyong, talas, dan iles-iles. Potensi yang saat ini belum memanfaatkan dengan baik dan merupakan potensi lokal yang ada di

Indonesia serta memiliki potensi produksi yang tinggi yaitu sagu.

## **B. Pembahasan**

### **Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal**

#### **1. Pengertian Daerah Tertinggal**

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004) daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain.

Selanjutnya, wilayah tertinggal dalam kerangka penataan ruang nasional didefinisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi jauh tertinggal dari rata-rata nasional, baik akibat kondisi geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya. Pengertian yang lebih umum menyebutkan bahwa wilayah tertinggal merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam mengikuti dan memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah.

Pada hakekatnya pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal sering menghadapi persoalan yaitu adanya tumpangtindih kegiatan dengan program penanggulangan kemiskinan. Secara umum, memang beberapa kegiatan program pembangunan daerah tertinggal pada

dasarnya sama dengan program penanggulangan kemiskinan yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terisolir, tertinggal, terpencil dan miskin. Namun, dalam program pembangunan wilayah tertinggal targetnya lebih luas mengingat bukan hanya manusia atau masyarakat saja yang perlu dibenahi, melainkan pengembangan aspek spasial yaitu wilayah yang memiliki fungsi tertentu agar wilayah dengan fungsi tertentu atau wilayah tersebut berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Bappenas (2012) wilayah tertinggal secara umum dapat dilihat dan ditentukan berdasarkan letak geografisnya yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu wilayah tertinggal di pedalaman dan wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil.

## 2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal

Melihat persoalan-persoalan tersebut, menurut Bappenas (2012) untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program, penyelesaian wilayah tertinggal perlu menggunakan prinsip-prinsip pengembangan yaitu sebagai berikut : (a) berorientasi pada masyarakat (*people centered*) : masyarakat di wilayah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, (b) berwawasan lingkungan (*environmentally sound*) : berkembangnya kebutuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi dan modernisasi dapat mendorong terciptanya kegiatan merusak lingkungan seperti pengrusakan hutan lindung dan terumbu karang, (c) sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat (*culturally appropriate*) : pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan masyarakat perlu memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan tradisional

(*traditional wisdom*) dalam kehidupan masyarakat setempat, dan memperkaya khasanah budaya bangsa, (d) sesuai kebutuhan masyarakat (*socially accepted*) : kegiatan pengembangan wilayah tertinggal harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat penerima manfaat dan bukan berdasarkan asas pemerataan dimana setiap daerah berhak atas bantuan pendanaan dari pemerintah, dan (e) tidak diskriminatif (*non discriminative*) ; prinsip ini digunakan agar kegiatan penanganan wilayah tertinggal tidak bias pada kepentingan pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran program.

### **Potensi Sagu**

Indonesia dianugerahi Tuhan dengan kekayaan alam yang sangat besar. Salah satu kekayaan tersebut berasal dari tanaman penghasil karbohidrat potensial yaitu sagu. Potensi sagu yang ada di Indonesia belum termanfaatkan dengan optimal. Keterbatasan infrastruktur serta pemahaman masyarakat maupun pemerintah yang terbatas menjadikan sagu sebagai salah satu komoditas yang tidak masuk prioritas . sagu yang ada di dunia tersebar di beberapa negara tropis, tetapi sebagian besar terdapat di negara Asia Tenggara. Negara yang memiliki luasan sagu terbesar yaitu Indonesia, Papua Nuginia, dan Malaysia.

Tanaman sagu yang ada di Indonesia tersebar hampir di seluruh pulau besar dan masuk ke dalam daerah pinggiran. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua merupakan pulau yang ditumbuhi sagu. Sagu tumbuh pada daerah pinggir sungai dan pinggir laut setelah vegetasi bakau. Daerah pinggiean yang jarang program-program pemerintah masuk juga banyak ditumbuhi sagu, bahkan sejak zaman dahulu masyarakat pinggiran sudah memanfaatkan sagu sebagai makanan utama sebelum beras masuk. Potensi daerah pinggiran untuk dikembangkan menjadi daerah berbasis pangan lokal seperti sagu harus tersebar di

seluruh Indonesia.

Pemanfaatan produk turunan sagu sangat beragam (Bintoro et al. 2016) . Pati dan limbah sagu dapat dijadikan produk-produk yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pati sagu dapat dijadikan makanan pokok pengganti beras karena karbohidrat yang terkandung tidak jauh berbeda dengan beras. Pati sagu bila diolah lebih lanjut dapat dijadikan gula cair. Gula hasil hidrolisis pati mempunyai kemiripan dengan gula tebu, yaitu rasa dan tingkat kemanisan hampir sama. Pati sagu juga dapat dijadikan biofuel sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan ramah lingkungan. Produk turunan pati sagu lainnya dapat dijadikan bahan baku kosmetik dan plastik ramah lingkungan (*biodegradable*). Ampas sagu dapat dijadikan media tanam beberapa sayuran. Menurut penelitian Andika et al. (2016) kombinasi antara tanah dan ampas sagu menghasilkan menggunakan kompos dan agen hayati.

Ampas sagu juga telah dimanfaatkan menjadi kemasan pangan ramah lingkungan. Menurut Fatmawati et al. (2016) pembuatan *biofarm* terbaik menggunakan ampas sagu dengan serat dedak sorgum sebanyak 40%, memiliki daya tarik sebesar 22,23-49,30N/mm dan memiliki daya serap air yang rendah. Pemanfaatan ampas sagu sebagai pakan ternak yaitu itik juga telah dilakukan di Desa Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti. Ampas sagu sebanyak 25% dari total pakan diberikan dan itik memakan pakan tersebut dengan cepat. Ampas sagu dalam pakan berfungsi sebagai nutrisi itik untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat dan serat.

Sagu di Indonesia masih sedikit yang dilakukan pemanenan, padahal potensi areal sagu mencapai lebih dari 5,2 juta ha. Tanaman sagu yang tidak terpanen patinya akan hilang dan pada akhirnya mati. Sebagian besar tanaman sagu yang tidak terpanen terdapat pada hutan sagu alami dan masyarakat jarang masuk ke dalam hutan tersebut. Menurut Djoefrie et al. (2014) diperkirakan dalam satu tahun, sebanyak 6 juta ton pati terbuang di Papua. Terlebih lagi konversilahan

sagu mnejadi areal perkantoran, gedung pendidikan, dan pusat perbelanjaan semakin meluas, akibatnya keanekaragaman sagu pada daerah asli (*in situ*) akan hilang dan punah.

### **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sistem Kelembagaan**

Perangkat keputusan politik melalui UU 22 tahun 1999 yang pelaksanaannya dimulai 1 Januari 2001 telah melahirkan sisi positif yaitu tampak dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik misalnya kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, serta keleluasaan rakyat memilih sendiri gubernur, bupati dan walikota. Sayangnya otonomi daerah belum sepenuhnya dirasakan pada perbaikan ekonomi rakyat, kesejahteraan di daerah belum tampak secara signifikan apalagi merata di semua tingkatan, selain karena naiknya harga BBM hampir setiap tahun.

Sentuhan pengembangan yang tidak mempertimbangkan konsep keterpaduan yang harus dipahami oleh setiap daerah, maka pengembangan ini akan mengalami kegagalan (*unsustainable*) bahkan tidak member keuntungan sosial ekonomi (*intangibile benefits of sosial and economy*). Secara mendasar, keterpaduan pengembangan masyarakat desa (tertinggal) didasarkan pemahaman bahwa entitas internal suatu sistem tidak lain adalah melihat masyarakat daerah /kabupaten sebagai satu kesatuan sosio kultural yang berarti relasi antara unsur-unsur pengetahuan lokal (*local knowledge*), *sumber daya alam*, *sumber daya manusia* serta *kelembagaan*.

Beberapa komponen yang akan dijelaskan untuk memahami keterpaduan dalam mengembangkan masyarakat berarti: 1) Keterpaduan dalam hal nilai (*value*) sebagai prinsip pemberdayaan . Nilai ini diwadahi dalam beberapa hal seperti keagamaan, pengetahuan, dan kebiasaan. Nilai kemanusiaan, kepentingan bersama, dan prinsip dialogis dalam menegakkan kebersamaan. 2)



Keterpaduan antar sektor, perencanaan, dan kegiatan sederhana sehingga mudah untuk dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

Desa sebagai satu institusi atau ruang publik untuk hidup bersama dengan suatu sistem gagasan tentang mata pencaharian, religiositas, serta sistem relasi dari setiap individu yang menjembatani kepentingan sosial-ekonomi, politik, dan budaya dengan kekuasaan wilayah di atasnya. Dari pengertian tersebut, desa memiliki peranan penting dan unik dalam sistem pemerintahan nasional, regional, dan lokal. Artinya sesuai dengan konsep Otonomi daerah dengan UU no. 32 dan 33 tahun 2004 serta keterpaduan antar sektor, kewilayahan serta nilai-nilai sosial budaya yang menjadi prinsip dasar pengembangan masyarakat, maka kewenangan untuk mengatur potensi dan kepentingan desa menjadi dikedepankan.

### **Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Potensi Desa**

Sarana transportasi pada wilayah-wilayah tertentu terpenuhi dengan pengaspalan atau pengerasan jalan secara swadaya maupun subsidi dari pemerintah, namun sebagian besar adalah atas inisiatif masyarakat termasuk pendanaannya. Desa ini memiliki potensi alam berupa perbukitan yang mengandung batu-batuan ziolit. Bebatuan ini oleh masyarakat setempat menjadi harapan bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Hingga saat ini pengelolaan batu ziolit ini masih diolah secara belum maksimal, oleh karena belum adanya investor yang mengembangkannya.

Oleh karena kondisi tanah yang tidak subur, tanah menjadi sulit ditanami padi, maka sebagian besar tanah ditanami kedelai, jagung atau ketela yang mudah tumbuh di daerah seperti Mertelu ini. Desa yang masih tertinggal oleh karena kondisi geografis, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan relative tertinggal. Masyarakat secara swadaya, memiliki inisiatif untuk melakukan deversifikasi usaha sebagai

antisipasi terhadap kondisi alam yang gersang.

Pemilihan ketiga desa tertinggal sebagai diasumsikan semakin jauh dari kota kecamatan, kemandirian semakin tampak dinyatakan dalam aktivitas masyarakat khususnya di sector ekonomi produktif (terutama ketika terjadi bencana tanah longsor, gagal panen). Aktivitas ekonomi itu meliputi (1) Pembangunan baik di bidang pertanian, peternakan juga perkebunan, pendidikan serta mata pencaharian lain; (2) Keterlibatan pada proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan secara individu maupun kelompok intseses yang diselenggarakan, misalnya peningkatan kualitas diri melalui pelatihan, pemagangan agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal hidup masa depan yang lebih baik di masyarakat; (3) keterlibatan masyarakat desa dalam pengembangan kecamatan merupakan bentuk kepedulian masyarakat dengan pola desentralisasi.

Sebagai payung penelitian, hibah ini berhasil mengangkat tema-tema payung penelitian yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengungkap lebih banyak mengenai potensi serta kebutuhan masyarakat untuk belajar dan mengembangkan diri serta lingkungannya, salah satu mahasiswa di desa Hargomulyo memperdalam need assessmennya dengan mengeksplorasi data- data yang berkaitan dengan potensi manusia dan potensi alam yang memberi peluang untuk peningkatan tingkat kesejahteraan
- b. Pemberdayaan kelompok lansia yang berhasil diungkap melalui penelitian mahasiswa misalnya pada pemberdayaan ekonomi produktif bagi lansia, juga kapasitas fisik serta psikologis termasuk kehidupan kerohanian lansia ditingkatkan agar para lansia menjadi lebih percaya diri, sehat dan produktif.
- c. Bentuk pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan kelompok PKK agar kaum perempuan memiliki pengetahuan, keterampilan tertentu untuk menunjang kegiatan ekonomi produktifnya..

- d. Remaja dan pemuda juga menjadi kelompok sasaran bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu alasannya adalah kelompok pemuda dan remaja ini merupakan kelompok yang rawan akan pengaruh-pengaruh negatif, sehingga melalui karang taruna, kelompok remaja dan pemuda ini dibentuk untuk meningkatkan ketahanan fisik dan mentalnya dengan kegiatan-kegiatan seperti olah raga, kerohanian serta keterampilan-keterampilan yang berorientasi pada kewirausahaan seperti beternak.

### **Pemanfaatan Ampas Sagu Untuk Media Tanam Jamur**

Tanaman sagu memiliki kandungan pati yang sangat tinggi. Rendemen pati tanaman sagu rata-rata dapat mencapai 20% dari total bobotnya. Berdasarkan Dewi *et al.* (2016) rata-rata rendemen sagu di Sorong Selatan sebesar 18,2% dengan rata-rata produksi pati kering 236,7 kg/batang. Dari besarnya rendemen tersebut dapat diketahui bahwa limbah yang dihasilkan dari pengolahan sagu cukup besar. Menurut Suyerman (2016) biomassa pohon sagu dalam industri pati sagu yang terbanyak limbahnya dengan perbandingan pati dengan limbah yaitu 20:80.

Limbah yang dihasilkan oleh tanaman sagu di antaranya berupa tajuk (daun), kulit batang, dan ampas sagu (empulur), selain itu juga dihasilkan limbah cair dari sisa pengekstrakan pati sagu. Limbah sagu di Kabupaten Meranti sebagian kecil dibuang ke darat, dan sebagian besar dibuang ke sungai dan laut sehingga mencemari lingkungan (Suyerman 2016). Limbah sagu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia di antaranya daun sagu sebagai atap rumah tradisional, pelepah, dan kulit batangnya sebagai dinding rumah. Limbah ampas sagu berupa serat dan serbuk sagu memiliki banyak kegunaan di antaranya pakan ternak, industri kertas, media jamur, briket, selain itu limbah cairnya juga dapat dimanfaatkan sebagai biogas dan pupuk cair organik (PCO). Ampas sagu merupakan hasil samping yang sudah tidak terpakai dari ekstraksi pati berupa serbuk dan serat (*lignosellulose*).

Pemanfaatan ampas sagu yang potensial dikembangkan dalam usaha skala kecil

(rumah tangga) adalah sebagai media jamur. Limbah ampas sagu berpotensi sebagai media tanam jamur merang. Hal tersebut disebabkan ampas sagu yang terfermentasi memiliki peningkatan nutrisi sebanyak 14% dari sebelumnya sehingga dapat menjadi media tumbuh jamur yang baik (Suyerman 2016).

Jamur memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi terutama protein dan karbohidrat. Suyerman (2016) menyebutkan bahwa jamur memiliki tingkat kandungan protein dan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi dan kentang. Jamur yang potensial dikembangkan dengan memanfaatkan media ampas sagu antara lain jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping. Jamur merang merupakan jamur yang termasuk dalam kategori *edible mushroom* yaitu jamur yang dapat dimakan. Jamur merang juga memiliki nilai nutrisi yang tinggi terutama protein. Jamur merang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan cukup banyak diminati oleh konsumen. Jamur lainnya yang masuk dalam kategori *edible mushroom* yang dapat dibudidayakan dengan media ampas sagu yaitu jamur tiram dan jamur kuping.

### **Pupuk Organik dan Amelioran**

Media tumbuh jamur memiliki bahan dasar berupa bahan organik (ampas sagu sehingga limbah tersebut sangat potensial jika dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik dan akan lebih baik jika dimanfaatkan sebagai pupuk. Media tersebut telah mengalami proses pengomposan. Berdasarkan penelitian Kusuma (2014) semakin lama masa inkubasi baglog maka semakin tinggi kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium pada baglog jamur tiram. Rubiyah (2012) menyebutkan bahwa pembuatan pupuk kompos berbahan limbah baglog cukup dengan menambahkan EM4 dan bahan organik lainnya.

## Hambatan dalam Implementasi Pemberdayaan Yang Berbasis pada Otonomi Daerah dan Keterpaduan.

Dari uraian diatas jelas bahwa **kendala pertama** adalah pemahaman dan penjabaran atas makna desentralisasi, kewenangan serta keterpaduan belum sepenuhnya terjadi pada aparat pemerintahan bahkan yang memiliki kewenangan untuk terjadinya sosialisasi dan internalisasi peraturan perundangan yang berkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat. **kendala kedua** apakah kompleksitas persoalan otonomi daerah yang mengamanatkan pada esensi desentralisasi maupun keterpaduan antar sector, bidang dan institusi ini lebih ditangkap sebagai peluang atau beban khususnya di tingkat kecamatan. **Kendala ketiga** yang dihadapi dalam implementasi pemberdayaan berbasis otonomi dan keterpaduan ini adalah tidak responsifnya pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

### C. Kesimpulan

Beberapa desa yang diklasifikasi sebagai desa tertinggal justru memacu masyarakat bersama aparat pemerintah setempat untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Pada awalnya dengan dukungan perundangan tentang otonomi daerah, keterpaduan, keberlanjutan, serta keserasian semakin memotivasi terselenggaranya pelaksanaan pengembangan masyarakat.

Pada tahap implementasinya, pemberdayaan masyarakat berbasis keterpaduan dan otonomi daerah mengandung beberapa kendala: (1) keberagaman persepsi atau pemahaman mengenai kewenangan daerah dan pusat; (2) kompleksitas persoalan otonomi dan keterpaduan berakibat pada beratnya beban yang disandang lembaga pemerintah seperti kecamatan; (3) kurang responsifnya pemerintah kabupaten akan kebutuhan masyarakat baik ketidaksesuaian dengan kebutuhan maupun lambatnya perangkat peraturan yang diberikan.

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Memfungsikan kembali peran pemerintah kecamatan dan desa dalam sistem kelembagaan yang benar bagi terselenggaranya proses pemberdayaan.
2. Menyadari akan kelemahan konsep otonomi daerah dan keterpaduan. perlu secepatnya diselenggarakan sosialisasi secara komprehensif dengan dibarengi seperangkat peraturan sebagai pedoman pelaksanaan pemberdayaan ditingkat kecamatan atau dibawahnya agar pemahaman akan otonomi daerah, keterpaduan serta keberlanjutan semakin lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. Data Daerah Tertinggal di Indonesia[internet]. [diunduh 29 Nov 2016]. Tersedia pada <http://kpdt.bps.go.id>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Indonesia 2015*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Impor beras menurut negara asal utama, 2000-2014. [diunduh 2016 Apr 25]. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/link-TabelStatis/view/id/1043>.
- Andika D, Djoefrie MHB, Amarilis S, Pamungkas I. 2016. Pemanfaatan ampas sagu *Metroxylon spp.* Sebagai media persemaian cabai dan terung. *J Metroxylon Indonesia* 1(1):37-42.
- Bintoro MH, Pratama AJ, Ahmad F, Nurulhaq MI. 2016. Pengembangan Sgau di Indonesia. Bogor (ID): IPB Press.
- Dewi RK, Bintoro MH, Sudrajat. 2016. Karakter morfologi dan potensi beberapa aksesi sagu (*Metroxylon spp.*) di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. *Jurnal Agron. Indonesia*. 44(1): 91-97.

- Djoefrie MHB, Herodian S, Ngadiono, Thoriq A, Amarilis S. 2014. Sagu untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua: Suatu Kajian dalam Upaya Pembangunan Sagu sebagai Komoditas Unggulan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jakarta (ID): Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. 195 hal. (tidak dipublikasikan).
- Fatmawati F, Djoefrie MHB, Mumpuni RP, Iriani ES. 2016. Pemanfaatan ampas sagu untuk peningkatan sifat fisik mekanik kemasan pangan ramah lingkungan. *J Metroxylon Indonesia* 1(1): 26-36.
- Kjaer A, Barford AS, Asmussen CB, Seberg O. 2014. Investigation of genetic and morphological variation in the sago palm (*Metroxylon sagu*; Arecaceae) in Papua New Guinea. *Annals of Botany*. 94(1):109-117.
- Kusuma W. 2014. Kandungan nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) limbah baglog jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) dan jamur kuping (*Auricularia auricula*) guna pemanfaatannya sebagai pupuk [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Hasanudin.
- Rubiyah. 2012. Pemanfaatan limbah baglog jamur tiram [internet]. [diunduh 2016 Ape 20]. Tersedia pada: <http://pertanianasahan.blogspot.com/2012/04/pemanfaatan-limbah-balog-jamur-tiram20.html>.
- Suyerman. 2016. Agribisnis Berbasis Limbah Sagu. Indrayan. Focus Group Discussion Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran melalui Sagu, Jakarta, 6 April 2016. [tidak dipublikasikan]